

PASUKAN PERANG HULUBALANG SUBAYANG TERAKHIR

(Mencari Jejak Sejarah di Bumi Khatulistiwa)

Oleh : ZALDI ISMET

1. ORANG SUBAYANG DALAM ADAT

Akhir abad ke 18 tepatnya 1883 Masehi kondisi Rantau Kampar kiri dalam kondisi tegang, ekspedisi Netcher dari pemerintah Kolonial Belanda yang berpusat di Bengkalis, sudah lalu memasuki Rantau Kampar Kiri. mereka melakukan berbagai penyelidikan terhadap sumber daya alam berupa hasil tambang, hasil hutan, kekayaan alam yang tersimpan di dalam sungai dan di dalam hutan. Ekspedisi Netcher dan koleganya berupaya untuk mencari sumber daya alam yang mungkin untuk dieksploitasi di kawasan Rantau Kampar kiri pada wilayah sungai Sibayang, Singing, dan Sitingkai. Hasil penyelidikan itu membuahkan hasil bahwa Rantau Kampar Kiri memang memiliki sumber daya alam berupa emas, Batu Bara, Timah, tanah perkebunan dan hasil sungai dan hutan yang melimpah.

Wilayah Rantau Kampar kiri tersebut sudah dipetakan oleh pemerintah Kolonial Belanda baik peta geografis maupun peta sosial, peta politik, dan peta kekuatan militernya. Sebab mereka tahu Rantau ini memiliki Payung Panji Adat sebagai benteng pertahanan yang sangat kuat yakni "KEDAULATAN YANG DIPERTUAN GUNUNG SAILAN." Melalui para detektif sejarah dan politik yang diutus oleh Pemerintah Kolonial Belanda yakni Mr. IL Obrien, Belanda mengetahui bahwa Masyarakat Adat di kawasan Rantau Kampar Kiri berbeda dengan masyarakat adat di kawasan Rantau Kampar Kanan.

Masyarakat adat Rantau Kampar Kiri memiliki sebuah ikatan pemersatu sebagai Payung Panji Adat yakni "Daulat" Yang Dipertuan Gunung Sailan. Walaupun setiap Luwak ada penghulunya masing-masing, tetapi setiap penghulu Luwak itu memiliki ikatan sejarah adat dan kekeluargaan dengan Yang Dipertuan Gunung Sailan.

Rantau Kampar Kiri dan Defendensinya terdiri atas kawasan Singingi, Subayang, dan Sitingkai, semua kawasan ini terkoneksi dengan sungai besar yang bernama Kampar Kiri dan di Hilir sungai Kampar Kiri itu ada sebuah wilayah kontrol kekuasaan (*central power*) yang bernama GUNUNG SAILAN, di situ pusat kekuatan masyarakat adat di Rantau Kampar Kiri pada masa dahulu yakni MENGONTROL JALUR UTAMA SUNGAI KAMPAR KIRI.

Para ahli politik dan strategi Belanda mengetahui bahwa Rantau Singingi, Rantau Subayang, dan Rantau Sitingkai memiliki kandungan emas yang melimpah, dan kekayaan emas itu yang menjadikan Rantau ini makmur dan aman. Pemerintah Kolonial juga mengetahui bahwa setiap Penghulu Adat di luwak di Subayang, Sitingkai, dan Singing pada dasarnya mengakui bahwa raja mereka adalah " YANG DIPERTUAN BESAR " di Gunung Sailan. Sebagai masyarakat adat yang kuat memegang "SUMPAN SOTIE" Adat berupa ketaatan kepada Pemimpin Adat, merupakan sesuatu hal yang sangat tabu untuk melawan Raja (BASALAH KEPADA RAJA DIBUNUH).

Kekuasaan Raja Gunung Sailan bukan hanya kekuasaan mutlak politis dan militer, akan tetapi bagi masyarakat adat Rantau Kampar Kiri " RAJA YANG DIPERTUAN BESAR DI GUNUNG SAILAN" adalah simbol kepemimpinan ideologis dan geneologis, dari Payung Panji Adat Raja Alam Minangkabau di PAGARUYUNG.

Untuk menaklukkan Rantau Kampar Kiri, Belanda tidak mungkin menyatakan perang secara langsung melalui operasi militer, hal itu akan membangkitkan semangat persatuan berdasarkan kesamaan ideologis

Politik Adat bagi seluruh Penghulu Adat di Rantau Kampar Kiri. IL Obrien yang ditugaskan oleh Residen Belanda di Bengkalis sebagai Pengontrol wilayah Rantau Kampar Kiri menemukan jalan masuk yang paling sesuai untuk menundukkan wilayah ini yakni 'Politik Devide et Impera.'

Di Rantau Kampar Kiri sebelum terjadinya pengaruh Kolonial Belanda, ada 5 luwak masyarakat adatnya " itulah Orang Rantau Kampar Kiri" yakni :

1. Luwak Sibayang;
2. Luwak Singingi;
3. Luwak Sitingkai;
4. Luwak Kampar Kiri;
5. Luwak Teso.

Dari lima Luwak yang ada, semuanya di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Besar Rantau Kampar Kiri di Gunung Sailan. Pemersatu Rantau itu pada sejarah asalnya digagas oleh dua Luwak utama yakni :

1. Luwak Subayang (Andiko)
2. Luwak Kampar Kiri (Daulat)

Di Rantau Kampar Kiri, pendukung utama dari Daulat Yang Dipertuan Gunung Sailan ini adalah penghulu-Penghulu Adat dari dua luwak ini. Dominasi Luwak Kampar Kiri dan Luwak Subayang tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lalu Rantau Kampar Kiri yakni wilayah Kedaulatan " Kerajaan Islam Kuntu Darussalam" yang beprusat di Negeri Kuntu di Batang Sibayang pada abad ke 12-14 Masehi. Kekuatan Penghulu Adat Rantau Subayang itu yang menjadi kekuatan inti dalam Pendirian "Daulat" Yang Dipertuan Rantau Kampar Kiri pada abad ke 17 Masehi.

Pendirian Daulat di Gunung Sailan dalam Luwak Kampar Kiri pada dasarnya berlandaskan Kesepakatan para Penghulu Adat di Luwak Sibayang dan Luwak Kampar Kiri pada sebuah Syuro Adat di Negeri "SUBANGI" (Domo) Kenegerian Kuntu. Keinginan dari Para Penghulu Adat di Rantau Subayang untuk kembali menghidupkan Daulat di Rantau Kampar Kiri ini yang menjadi dasar berdirinya Daulat Yang Dipertuan Gunung Sailan.

Rantau Subayang sendiri terdiri dari beberapa Laras (Laghe). Dahulu Laras ini yang menjadi daerah inti Kesultanan Kuntu Darussalam yakni :

1. Laghe Kuntu;
2. Laghe Ujung Bukik;
3. Laghe Kidaegh (Laras Kiri);
4. Laghe kanan (Batang Bio).

Wilayah empat Laras (Laghe) ini pada masa kekuasaan Kerajaan Kuntu Darussalam yang dipimpin oleh empat Khalifah dengan Sulthan yang berkedudukan negeri Kuntu. Shultan Pertamanya Sulthan Muhammad Amrullah dengan dibantu oleh seorang Qadhi bernama Haji Fadilullah. Setelah jatuhnya Kesultanan Kuntu akibat serangan Tentara Ekspedisi Pamalayu abad ke 13 Masehi, maka Dinasti Perkasa alam dari Kerajaan Aru Barumun melanjutkan kekuasaan Kesultanan Kuntu ini dengan empat orang Sulthan yang makanya ditemukan oleh Izerman (Peneliti Belanda) di Kuntu yakni :

1. Sulthan Sayyed Amarullah Perkasa Alam;
2. Sulthan Ibrahim Saleh Perkasa Alam;
3. Sulthan Johan Alim Perkasa Alam;
4. Sulthan Rasyid Karim Perkasa Alam.

Pada abad ke 14 Kesulthanan Kuntu Dinasti Perkasa Alam ini direbut oleh tentara Adityawarman dari Palembang, maka berakhir lah kekuasaan Kerajaan Islam Kuntu Darussalam Dinasti Perkasa Alam.

Tokoh-tokoh adat di Rantau Subayang ini yang pada abad ke 16 Masehi di dalam masa kekuasaan Kerajaan Pagaruyung kembali bermufakat untuk mendominasi Rantau Kampar Kiri dengan mengadakan lobi-lobi politik kepada Sulthan Kerajaan Pagaruyung yang akhirnya menyetujui untuk menyerahkan kembali Kawasan Rantau Kampar Kiri kepada dominasi orang-orang Rantau Subayang, hanya saja Payung Panji Rantau Kampar Kiri adalah dari keturunan Daulat Yang Dipertuan Gunung Hijau (Pagaruyung) yang menguasai Minangkabau (Sumatera tengah).

Para Penghulu Adat Rantau Subayang ini berhasil mengadakan sebuah kesepakatan politik dengan Kerajaan Pagaruyung untuk mendominasi Rantau Kampar Kiri dengan Pusat Daulat di Negeri Gunung Sailan Luhak Kampar Kiri. Penetapan Ibukota Daulat di Hilir Sungai Kampar Kiri (Rantau) adalah sebuah strategi dari para Penghulu Adat di Rantau Subayang untuk mendominasi semua kawasan Rantau Kampar Kiri.

Dominasi Penghulu Adat Rantau Subayang terhadap Rantau Kampar Kiri berlangsung selama lebih kurang 300 tahun dari abad ke 17 Masehi sampai kepada awal abad ke 19 Masehi.

2. POLITIK BELANDA DI RANTAU KAMPAR KIRI

Ketangguhan Penghulu Adat Rantau Kampar Kiri dalam mempertahankan wilayah adatnya dari penaklukan Belanda, diakui sendiri oleh pemerintah kolonial dengan sebutan “ BELANDA BERBENTANG BESI, KAMPAR KIRI BERBENTENG ADAT”. Kekuatan Pasukan Militer Belanda dalam medan perang penaklukan kerajaan-kerajaan Nusantara yang berdaulat tentu sudah diakui oleh dunia. Akan tetapi pasukan Marsose Belanda itu tidak berani menyatakan perang secara langsung terhadap Kerajaan Gunung Sailan Rantau Kampar Kiri.

Ketakutan ini tentu beralasan, sebab ekspansi militer tanpa perhitungan akan membangkitkan semangat perlawanan dari rakyat yang memiliki soliditas tinggi dalam adat dengan adanya sistem kepemimpinan adat yang tangguh dan berdaulat. Kepemimpinan keturunan Daulat Pagaruyung dalam adat di Rantau Kampar Kiri adalah harga mati, Sesuai dengan Sumpah Sotie di Muara Bio. Kepemimpinan itu tidak dapat digantikan oleh siapapun dengan dalil apapun, baik dalil adat maupun dalil syarak (Islam). Di rantau ini siasat untuk mengadu domba kaum adat dan kaum agama (Paderi) tidaklah berlaku, Sebab di rantau ini Adat dan Syarak adalah menyatu, Penghulu dan Ulama adalah satu badan yang tidak dapat dipisah. Guna Adat adalah untuk menjalankan agama, Penghulu Adat adalah yang bertulang kuat dan Ulama adalah Nan bamato Nyolang Bacomin Terus. Penghulu Adat di Rantau Kampar Kiri adalah kaum Paderi itu sendiri dan Kaum Paderi adalah Para Penghulu Adat itu sendiri.

Kenyataan “facta Sosial Relegius” ini membuat pemerintah kolonial mencari cara lain yakni “ Strategi Bola Buluo”. Strategi Bola Buluo ini adalah siasat yang dibuat untuk mengadu-domba antara kaum kerabat Dinasti Pagaruyung. Satu Kerabat yang saling bertali soko dan bako ini akan dipecah-belah dan diadu domba, satu kerabat akan diangkat dan didukung oleh pemerintah kolonial dan kerabat yang lain akan disingkirkan, sehingga tercipta perpecahan di dalam keluarga besar Daulat Yang Dipertuan Besar Rantau Kampar Kiri.

Akibat perpecahan yang terjadi maka masing-masing kerabat akan memisahkan diri dengan kerabat yang lain sehingga wilayah Rantau Kampar Kiri ini akan dipecah-pecah menjadi kawasan yang kecil-kecil

sehingga mudah untuk dikendalikan, setelah dikendalikan maka para kerabat Diraja itu akan diadu domba untuk saling menguasai dan saling berperang diantara sesamanya.

3. AWAL MULA PERPECAHAN RANTAU KAMPAR KIRI

Kerabat Diraja Gunung Sailan dan Kerabat Diraja Gunung Hijau (Pagaruyung) adalah sebuah Dinasti yang satu, semuanya terikat dengan tali adat (SOKO-BAKO) atau (SAKI-BAKI) dalam adat. Semua anak-anak Raja Pagaruyung tersebar dalam semua pasukuan yang ada di Minangkabau dan tersebar di banyak negeri, mereka itu yang diangkat, dituakan sehari dan ditinggikan seranting sebagai Payung Panji adat dengan berbagai gelar baik itu Raja Yang Dipertuan, Khalifah ataupun Penghulu Adat.

Pada awal abad ke 17 Masehi, dalam sejarah masyarakat adat di Rantau Kampar Kiri, semenjak penjemputan “YANG DIPERTUAN MUDA RAJA MANGIANG” sebagai Raja Muda Pagaruyung di Rantau Kampar Kiri. Beliau beserta Saki-baki keturunannya adalah “Yang Dipertuan untuk seluruh Rantau Kampar Kiri, meliputi seluruh Luhak dan laras yang ada di rantau ini. Semenjak itu Rantau Kampar Kiri juga banyak didatangi oleh keturunan Daulat Pagaruyung. Keluarga Diraja yang datang itu menetap di Luwak Singingi (Yang Dipertuan Gadi), di Luwak Sibayang (Puti Bijo) di Luwak Sitingkai (Datuk Liko Sutan Maliko) keturunan Diraja yang datang ini semuanya diangkat sebagai pembesar di luhak-masing-masing dan mengakui kekuasaan “DAULAT YANG DIPERTUAN GUNUNG SAILAN.”

Pada abad ke 18 Masehi, pada waktu masuknya pengaruh Kolonial Belanda di pusat Kerajaan Minangkabau di Pagaruyung, maka politik belah bambu (Bola Buluo) sudah mulai dilaksanakan. Politik Belah Bambu ini nantinya membuat terjadi perpecahan di dalam keluarga kerajaan di Pagaruyung. Imbas dari perpecahan dan perang saudara ini menjalar ke kawasan Rantau Kampar Kiri.

Pada abad ke akhir abad ke 18 Masehi datang seorang yang mengaku kerabat Diraja Pagaruyung yang bernama “Raja Bujang.” Raja Bujang ini bersama pengikutnya datang ke Rantau Subayang dan mengaku sebagai anak raja yang diutus untuk menggantikan Raja Gunung Sailan. Raja Bujang ini datang ke Negeri Kuntu dan mengadakan propaganda untuk mendirikan kerajaan baru yang akan beribukota di Negeri Kuntu meliputi Kuntu dan Rantau Singingi.

Agitasi dan propanganda ini mendapat dukungan dari sebagian Penghulu Adat di Negeri Kuntu, sampai ke Negeri Logas di Hulu Singingi, beliau dibantu oleh Datuk Tumenggung Logas dan beberapa Penghulu Adat di Negeri Kuntu.

Mufakat dari beberapa Penghulu Adat di Negeri Kuntu dan Singing untuk melepaskan diri dengan Kekuasaan Daulat Yang Dipertuan Rantau Kampar Kiri di Gunung Sailan ini tentu ada yang mendukungnya yakni pemerintah Kolonial Belanda. Raja Bujang dijadikan alat untuk merebut wilayah Kuntu dan Singingi dalam rangka menguasai wilayah Tambang Tujuan (yakni daerah tambang emas di Sungai Sibayang, Sitingkai, Singingi, Logas dan Ulu Teso). Upaya Separatis ini tentu mendapat perlawanan dari para Penghulu Adat di Luwak Sibayang dan Singingi yang masih setia dengan Daulat Yang Dipertuan Gunung Sailan. Pada akhir abad ke 18 Masehi Penguasa Adat Rantau Kampar Kiri adalah SULTHAN ABDUL JALIL YANG DIPERTUAN BESAR III.

Kaum Pemberontak yang dipimpin Raja Bujang, sudah berhasil menduduki Negeri Kuntu dan Menawan Datuk Bandaro Khalifah Kuntu di dalam benteng. Raja Bujang membuat benteng pertahanan di Negeri Kuntu, sehingga memutuskan hubungan transportasi antara Rantau Daulat dengan Kawasan Hulu Subayang. Di samping itu Raja Bujang juga berhasil menduduki Rantau Singingi sampai ke Logas dan Ulu

Teso. Pendudukan Raja Bujang terhadap Luwak Singingi membuat Penguasa Adat Luwak Singingi Yang Dipertuan Gadis terancam.

Tindakan Raja Bujang ini membuat perpecahan pada Rantau Kampar Kiri, Raja Bujang yang didukung oleh Belanda berhasil menguasai Tambang emas di Ulu Teso dan Logas, penguasaan daerah tambang ini turut memperkuat posisi kaum pemberontak ini.

4. PENUMPASAN KAUM PEMBERONTAK RAJO BUJANG

Para Penghulu Adat di Rantau Subayang, Khalifah Ujung Bukit, Ludai dan Batu Songgan, segera mengirim utusan untuk berunding dengan Yang Dipertuan Rantau Kampar Kiri di Gunung Sailan. Utusan yang dikirim adalah Datuk Maharaja Besar Khalifah Ludai (sebagai Pemengan Tonggol Kuning Milik Raja) di Luwak Subayang.

Raja Rantau Kampar Kiri memerintahkan kepada para Khalifah Subayang untuk mengirim pasukan perang untuk menumpas pemberontakan Raja Bujang yang menguasai Kuntu dan Singingi.

Datuk Maharaja Besar Khalifah Ludai, bersama Datuk Godang Khalifah Songgan dan Datuk Bandaro Khalifah Ujung bukit segera menyusun pasukan perang Subayang. Pasukan perang ini terdiri dari para Hulubalang pilihan dari setiap suku dan negeri yang memiliki kemampuan dan kesaktian. Untuk melatih pasukan perang Rantau Subayang ini didatangkan pelatih perang dan persenjataan dari Minangkabau (Negeri Lintau Buo/ Pasukan Yang Dipertuan Sembahyang). Dalam waktu singkat terkumpul ribuan pasukan Perang Subayang yang berasal dari 3 laras di hulu Subayang pasukan ini disebut "PASUKAN PERANG HULUBALANG SUBAYANG". Pasukan ini dipersenjatai dengan berbagai jenis senjata, termasuk Senampang Lontak, Pedang, Keris, Tombak dan Meriam. Ratusan Perahu Balunggang dipersiapkan untuk melakukan "Perang Perumpasan" terhadap pasukan pemberontak Rajo Bujang yang sudah menguasai Negeri Kuntu dan Luwak Singingi.

Untuk memimpin Pasukan Perang Subayang ini maka ditunjuk seorang panglima yang berasal dari keturunan Rumah Dalam Pasukan Malayu Palokoto Ludai yang menjadi Pemegang Panji/Tonggol Kuning Milik raja yakni ALI AKBAR DATUK PANGLIMO, masyarakat adat menyebutnya dengan sebutan DATUK ALI KOBAEGH atau DATUK JANGGUIK (sebab beliau berjanggut Panjang).

Pasukan Perang Hulubalang Subayang di bawah Pimpinan Ali Akbar Datuk Panglimo ini yang kemudian atas perintah Raja Rantau Kampar Kiri melakukan penyerangan ke Negeri Kuntu pada subuh hari dan membebaskan Datuk Khalifah Kuntu Dt. Bandaro Kuntu dari tawanan kaum pemberontak di bawah pimpinan Rajo Bujang. Setelah Negeri Kuntu dibebaskan maka penyerangan dilanjutkan ke sepanjang Rantau Singingi. Pertempuran besar meletus di Negeri Logas. Pasukan pemberontak pimpinan Rajo Bujang dipimpin oleh Datuk Tumenggung Logas dan Pasukan Subayang dipimpin oleh Ali Akbar Datuk Panglimo berhasil mengalahkan pasukan pemberontak dan Rajo Bujang melarikan diri kembali ke Pagaruyung.

5. PERPECAHAN PASCA PEPERANGAN SINGINGI-SUBAYANG

Menurut keterangan para tetua adat Rantau Kampar Kiri, perundingan pertama antara Kerajaan Gunung Sailan dengan Pemerintahan Kolonial Belanda terjadi tahun 1899. Di mana Sulthan Abdul Jalil YDP Besar bersama Datuk Khalifah Kuntu mengadakan suatu perjanjian untuk bergabung dengan Gubernemen Belanda di Bengkalis dalam bentuk 'Aliansi,' dimana kesepakatan yang dibuat adalah persekutuan bukan

penaklukan. Kesepakatan ini disebut oleh tetua adat dengan nama “Piagam Kuntu.” Piagam Kuntu ini yang menjadikan kedudukan Kerajaan Gunung Sailan dengan Kerajaan Belanda adalah setara.

Keinginan Belanda untuk menguasai luwak Singingi disebabkan karena wilayah tersebut terdapat kandungan emas dan batu bara yang berlimpah sehingga membuat Belanda sangat tertarik dan berkeinginan untuk menguasai wilayah tersebut. Setelah berhasil memasuki wilayah Rantau Singingi kemudian Belanda melakukan penelitian terhadap kandungan emas dan batu bara yang ada di Rantau Singingi, dan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kandungan emas dan batu bara di Rantau Singingi memang sangat banyak dan merekapun sangat berambisi untuk segera menguasai wilayah Rantau Singingi.

Upaya Belanda untuk menguasai Rantau Kampar Kiri yang memiliki kekayaan sumber daya alam tersebut, melalui kekuatan pendukungnya dari Kerajaan Pagaruyung melalui Pion Politik “Rajo Bujang” ternyata dapat digagalkan oleh kerajaan Gunung Sailan.

Maka dilakukan upaya kedua yaitu adanya keinginan dari masyarakat adat di Rantau Singingi dan Ulu Teso untuk berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan Daulat Yang Dipertuan Rantau Kampar Kiri. Salah satu alasan yang dipakai adalah adanya “tindakan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Hulubalang Subayang pada masyarakat Singingi pada waktu terjadinya perang Singingi-Subayang”. Keinginan masyarakat Luwak Singingi untuk berdiri sendiri tersebut didukung oleh Pemerintahan Gubernur Belanda di Bengkulu.

Sementara itu Raja Rantau Kampar Kiri Tengku Abdul Jalil YDP Besar, menolak untuk melepaskan Rantau Singingi dari kekuasaan Kerajaan Gunung Sailan. Setelah Pasukan Rajo Bujang dikalahkan oleh Pasukan Hulubalang Subayang, maka Rantau Kampar Kiri kembali dikuasai oleh Daulat Yang Dipertuan Besar Rantau Kampar Kiri. Hanya saja terjadi perpecahan dalam masyarakat di kawasan Rantau Singingi, dimana Penghulu Adat yang mendukung Rajo Bujang menganggap pasukan Subayang melakukan kekejaman terhadap masyarakat dalam peperangan tersebut.

Laporan penderitaan masyarakat Singingi atas peperangan tersebut diterima oleh Pemerintah Kolonial Belanda, seorang Controleur Belanda Mr. IL Obrien diutus oleh Residen Bengkulu untuk meninjau wilayah Singingi yang dilanda peperangan. Berdasarkan laporan tersebut akhirnya pemerintah Kolonial menerima tuntutan dari dua wilayah di Singingi untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Gunung Sailan yakni Luwak Ulu Teso untuk sementara waktu digabungkan kedalam Distrik Kuantan, lepas dari kontrol Raja Gunung Sailan dan Rantau Singingi dijadikan sebuah daerah Otonom sendiri (Zelbesturder) bukan lagi bagian dari kekuasaan Kerajaan Gunung Sailan. Raja Yang Dipertuan Gunung Sailan harus melepaskan klaimnya atas Rantau Singingi dan Ulu Teso.

Sulthan Abdul Jalil YDP Besar tetap bersekuat hati pernyataannya pada tahun 1899 Masehi di hadapan pemerintah Kolonial Belanda di Bengkulu di mana seluruh wilayah “Air nan bakacucuran dan tanah nan balerengan ke sungai Kampar Kiri adalah wilayah Daulat Yang Dipertuan Gunung Sailan”.

Pengakuan YDP Besar Sultan Abdul Djalil dari Kerajaan Gunung Sahilan, yang mana pada tahun 1899 Jamtoen Besar Sultan Abdul Djalil menyatakan kepada pihak pemerintah Belanda bahwa seluruh wilayah Rantau Singingi (termasuk Luwak Logas) dan Ulu Teso adalah di bawah kekuasaan kerajaan Gunung Sahilan dan telah mengeluarkan konsesi penambangan pada tanggal 1 Desember 1899 untuk seluruh wilayah tersebut.

Raja Rantau Kampar Kiri Tengku Abdul Jalil Yang Dipertuan Besar, menolak usulan Belanda tersebut, sebagai Sulthan Rantau Kampar Kiri beliau tidak mau menerima keluarnya Luwak Ulu Teso dan Rantau Singingi dari

Rantau Kampar Kiri. Pemerintah Kolonial mengancam akan melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Rantau Kampar Kiri secara langsung dari Bengkalis jika permintaannya ditolak.

Untuk menguasai Rantau Singingi dan Ulu Teso maka Belanda, Belanda pun menemui Datuk Nan Baduo yaitu Muhammad Taib (Muthalib) gelar Datuk Bandaro ke - 12 (Datuk Khalifah Ke 10) dan DJANA gelar Datuk Jalo Sutan selaku pimpinan pemerintahan adat Luwak Singingi pada saat itu dan mengajak berunding untuk memusyawarahkan pengelolaan kawasan Rantau Singingi terutama emas dan batu bara. Dalam perundingan itu maka Belanda berjanji akan mendukung mereka untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Gunung Sailan Rantau Kampar Kiri.

Penolakan terhadap tuntutan Belanda itu membuat Sulthan mengadakan persiapan perang besar-besar, Persenjataan dibeli berupa senapan dan meriam dari Singapura dan Malaka (Inggris). Para Hulubalang kembali dilatih untuk menggunakan senjata-senjata perang terkini dan modern.

Langkah-langkah Sulthan Abdul Jalil YDP Besar III yang menentang Belanda itu, membuat Belanda gusar. Sulthan Abdul Jalil kokoh pada pendiriannya bahwa Hubungan antara Belanda dan Rantau Kampar kiri adalah sejajar sesuai dengan 'Kesepakatan Piagam Kuntu 1899' yang beliau tandatangani di Bengkalis. Rantau Kampar Kiri Bukan bawahan Kerajaan Belanda atau Bawahan dari Afdeling Bengkalis, hubungan Rantau Kampar Kiri adalah kemitraan atau Persekutuan.

Pada tanggal 27 Februari 1905 pihak Belanda memanggil dan mengumpulkan seluruh Datuk dan pemangku adat yang ada di wilayah Kerajaan Gunung Sahilan dan Dependesinya (Rantau Kampar Kiri dan Loehak Sibayang, Singingi, Logas dan Ulu Teso) berkumpul di Bengkalis untuk membuat, menyetujui dan menandatangani pernyataan Pendek (Korte Verklaring) 1905 Masehi (GOENOENG SAHILAN EN ONDERHOORIGHEDEN VERKLARING) di hadapan Kontrolleur Belanda atas Rantau Kampar Kiri, Singingi dan Ulu Teso JG. Larive yang berisi :

Pertama : Bahwa daerah Gunung Sahilan adalah bagian dari Hindia Belanda dan oleh karena itu di bawah kekuasaan Belanda;

Kedua : Bahwa kita senantiasa akan setia kepada Yang Mulia Ratu Belanda dan kepada Yang Mulia Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai Perwakilan Tinggi;

Ketiga : Bahwa kita harus mematuhi dan mempertahankan semua pengaturan yang akan dimenangkan atas lansekap Gunung Sahilan oleh dan atas nama Pemerintah atau perwakilannya. Penduduk Pesisir Timur Sumatra, dan umumnya akan mengikuti semua pesanan yang diteruskan kepada kami oleh atau atas nama perwakilan-perwakilan tersebut.

Pada Perjanjian Plakat Pendek (Korte Verklaring) 1905 Masehi Raja Rantau Kampar Kiri, tetap mempertahankan Penguasaan Ulayat Kerajaan Rantau Kampar Kiri Bahwa Seluruh Luwak Singingi dan Ulu Teso adalah bagian dari Kerajaan Gunung Sailan. Pembukaan Pertambangan emas dan batu bara atas wilayah tersebut tetap harus mendapat Izin dari Raja Yang Dipertuan Besar. Sikap tegas Raja Kampar Kiri ini yang membuat Belanda akhirnya berupaya untuk menyingkarkan beliau melalui jalur intrik-intrik di dalam Kerajaan.

Pada tahun 1906 Masehi, Belanda membujuk Sulthan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah, posisi beliau sebagai Sulthan digantikan untuk sementara waktu oleh adik Beliau yakni Tengku Abdurrahma YDP Muda. Pada masa beliau melaksanakan ibadah haji tersebut yakni tahun 1909 Masehi maka terbitlah

“Singingi Verklaring” dan “Gunung Sahilan Verklaring”. Penandatanganan pernyataan tersebut dilakukan di Bengkalis pada tanggal 29 Mei 1907 bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1325 dihadapan Pemerintah Belanda yaitu H. F. Hesselaar selaku Asisten Residen Bengkalis.

Plakat kedua ini adalah pemaksaan sepihak oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk memecah belah Kerajaan Gunung Sailan Rantau Kampar Kiri. Dengan mengakui Rantau Singingi sebagai sebuah daerah otonom sendiri dan memasukkan Luhak Ulu Teso ke dalam Distrik Logas tanah darat yang dikontrol secara Langsung (Direcrule) oleh Afdeling Belanda di Bengkalis. Keputusan Sepihak Belanda ini membuat gempar Rakyat Kampar Kiri, keputusan ini dibuat atas dasar paksaan dan ancaman invasi militer terhadap Raja Rantau Kampar Kiri Tengku Abdurrahman YDP Muda.

Pada tahun 1909 Masehi itu adalah hari dimana Rantau Kampar Kiri ditetapkan wilayah kekuasaannya hanya meliputi Luhak Kampar Kiri, dan Luhak Sibayang serta satu wilayah Protektorat yakni Rantau Sitingkai. Pemisahan Wilayah Luhak Singingi dan Ulu Teso dari kekuasaan Kerajaan Gunung Sailan akibat dari Perang Singing-Subayang yang di setting oleh Belanda dengan pion Raja Bujang dari Pagaruyung ini menjadi titik awal penguasaan penuh Kerajaan Belanda atas Rantau Kampar Kiri yang sudah terpecah belah.

BERDASARKAN Perjanjian Gunung Sailan Verklaring tahun 1909 Masehi itu, Pemerintah Belanda Mendirikan kantor Demang “Kontrolleur” di Gunung Sailan, di samping itu mereka menempatkan satu Kompi Polisi Militer (Opas) dan mendirikan Bangunan Penjara di Gunung Sailan sebagai upaya untuk mengawasi pemerintahan Kerajaan Gunung Sailan.

Dengan berdirinya Kantor Ondef Afdeling Kampar Kiri di Gunung Sailan, maka Pemerintahan kolonial sudah menguasai wilayah Kampar Kiri. Penempatan Satu Kompi Opas dan pendirian penjara juga menjadi tanda bukti bahwa Pemerintah Kerajaan Gunung Sailan sudah diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Kekuasaan Kehakiman atas tindak pidana berat juga dihukum dengan hukum kanonik Belanda sehingga Pemerintah (Panre Paraja) sudah berada di tangan Belanda. Pada masa tersebut wilayah Rantau Kampar Kiri dimasukkan ke dalam wilayah admisnitarsi pemerintahan Belanda dengan Status “Onder Afdeling” di bawah Afdeling Bengkalis.

Pada masa ini pemerintahan adat di bawah Sulthan hanya berfungsi sebagai kepala agama Islam, dan perkara adat yang bisa diselesaikan secara mediasi serta upacara-upacara adat istiadat kerajaan. Semenjak itu kekuatan hulubalang sebagai pasukan perang kerajaan juga tidak lagi diaktifkan, hulubalang hanya berfungsi sebagai “Polisi Adat” di negeri dan Luwak saja.

Setelah mangkatnya Sulthan Abdurrahman YDP Muda Di Mekkah pada 1929 Masehi, Kerajaan Gunung Sailan dipimpin oleh Tengku Hasan Sulung sebagai Raja Ibadat dan Tengku Haji Abdullah YDP Sakti sebagai Raja Ibadat semenjak tahun 1930 Masehi.

Semenjak tahun 1930 Masehi, maka Rantau Singingi dijadikan sebuah daerah Otonom (Zelbesturende) yang juga memiliki seorang Sulthan yakni Sulthan Muhammad Siri. Sulthan Zelbestur Singingi ini masih juga kerabat Diraja Gunung Sailan. Semenjak tahun 1930 Masehi itu masa damai kembali terjadi di Rantau Kampar Kiri, Rantau Kampar Kiri, Singingi dan Ulu Teso menjadi sebuah wilayah eksploitasi pertambangan oleh Kerajaan Belanda yang membuka pertambangan emas di wilayah Logas dan Ulu Teso. Pembukaan tambang emas ini merupakan “Hadiah” atas keikutsertaan Belanda dalam memecah belah Rantau Kampar Kiri.

Pemerintah Belanda membuka tambang emas di Ulu Teso dan Tanah Darat Singingi, yang dikontrol melalui Distrik Kuantan. Sementara tambang emas di Logas dikelola Belanda bersama Pemangku adat dari Kerajaan Singingi. Semenjak itu Rantau Kampar Kiri hanya mendapatkan jatah kucuran limbah tambang saja, termasuk keruhnya air di batang Kampar Kiri.

Rencana pembukaan tambang emas oleh Belanda di Luwak Sitingkai dan Luwak Subayang ditentang oleh masyarakat dan Pemangku adat Kerajaan Gunung Sailan, sehingga usaha Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan emas di Subayang serta Sitingkai gagal untuk dilakukan. Kecuali tambang Timah di wilayah Tiga Koto Sibelimbing (Siabu) hulu sungai Lipai yang bermuara di Batang Kampar Kiri, wilayah ini dikuasai Belanda melalui perang dengan Datuk Tabano V Koto di Kampar Kanan. Belanda mengontrol tambang timah di Siabu melalui kantor Kontrolleur Belanda di Bangkinang. Rantau Kampar Kiri juga hanya mendapatkan jatah kucuran limbah Tailing Timah dan keruhnya air di Batang Lipai sampai ke Batang Kampar Kiri.

Pada tahun 1942 tentara Kekaisaran Jepang mendarat di Sumatera, Kekuasaan Kolonial Belanda di Bengkalis jatuh, Kontoleir Belanda di Rantau Kampar Kiri dan Singingi Haji Muhammad Saleh yang pada waktu itu berkantor di Kota Pekanbaru, menyerahkan Rantau Kampar Kiri dan Singingi serta Ulu Teso kepada Pemerintahan Militer Kekaisaran Jepang.

Daulat Rantau Kampar Kiri, 17 Agustus 2022

Ttd.

Penulis : Zaldi Ismet

(Penulis sekarang bermastautin di Desa Lipat Kain Selatan. Saat ini berprofesi sebagai Sekdes Lipat Kain Selatan, beliau juga Staf Wazir Istana Bidang Hukum Adat dan Sejarah).